

Radikalisme, Eichmann dan Pancasila

Otto Gusti*

<https://mediaindonesia.com/opini/172624/radikalisme-eichmann-dan-pancasila>

Media Indonesia, 18 Juli 2018

Gerakan radikalisme dan terorisme atas nama agama tetap jadi ancaman bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia. Hari Sabtu, 14 Juli 2018 lalu tim Detasemen Khusus 88 Antiteror menembak mati tiga orang terduga teroris di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Sehari kemudian tim Densus 88 kembali menangkap satu pasangan suami-isteri yang terduga teroris ketika coba menyerang Markas Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat. Mereka diduga terlibat dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan masih berafiliasi dengan pelaku teror di Jawa Timur dan kerusuhan di Mako Brimob Jakarta beberapa waktu lalu (MI, 16/7/2018).

Pendekata Lunak

Menanggapi kejadian ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah tinggal diam untuk memberantas dan mencegah bahaya terorisme dengan menggunakan pendekatan keras ataupun lunak. Jokowi juga meminta masyarakat untuk ikut berperan mendukung usaha pemerintah (MI, 16/7/2018).

Pendekatan keras maksudnya pendekatan keamanan yang zero toleransi terhadap aksi terorisme. Sedangkan pendekatan lunak berkaitan dengan pendidikan yang membuka ruang bagi toleransi dan penghargaan terhadap kebhinekaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebab, intoleransi adalah akar dan hulu dari radikalisme dan terorisme.

Untuk memperkuat perangkat lunak dalam usaha memberantas terorisme dan radikalisme, rejim Jokowi sudah menggiatkan usaha revitalisasi Pancasila lewat pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tentu usaha pemerintah ini patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Sebab para *founding fathers* bangsa ini telah menyepakati Pancasila sebagai basis ideologis yang mempersatukan Indonesia yang plural. Sebagai simbol identitas kolektif bangsa Pancasila mengatasi identitas-identitas komunal sehingga setiap individu, kelompok, pandangan hidup dan agama dapat mewujudkan dirinya secara otentik tanpa harus membahayakan yang lain.

Namun di sisi lain, kita tidak pernah boleh menutup mata terhadap fakta sejarah Orde Baru di mana Pancasila pernah dijadikan ideologi tunggal di tangan kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis warga dan menguburkan demokrasi. Kekuasaan itu dari kodratnya cenderung disalahgunakan. Maka, tak ada jaminan sedikit pun secara metodologis bahwa BPIP di era reformasi tidak dijadikan alat kekuasaan. Tambahan lagi jika BPIP tidak diisi oleh negarawan melainkan gerombolan partisan dari partai politik.

Guna mencegah terulangnya kesalahan rejim Orde Baru, bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila harus dikembangkan dalam proses dialektis dengan nilai-nilai global seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan ekonomi pasar bebas.

Tanpa keterbukaan terhadap peradaban global tersebut, Pancasila akan cenderung menjadi alat ideologi kekuasaan totaliter yang membahayakan kehidupan bersama yang plural dan toleran.

Eichmann

Sebuah studi penting tentang totalitarisme dan radikalisme pernah dibuat oleh seorang filsuf Jerman keturunan Yahudi, Hannah Arendt (1906-1975). Dalam salah satu studinya Arendt berbicara tentang figur Adolf Eichmann. Eichmann adalah seorang birokrat rejim

nasionalisme Jerman yang bertanggung jawab mengangkut orang-orang Yahudi ke *camp* konsentrasi untuk selanjutnya dimusnahkan.

Tentang kondisi kejiwaan Eichman, Arendt pernah menulis: “*Eichmann hat niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellte*” – “*Eichmann tak pernah membayangkan akibat dari apa yang dia lakukan*” (Bdk. Arendt, 1963). Ungkapan ini menyentuh substansi persoalan tanggung jawab manusia dalam era totalitarisme abad ke-20. Günter Anders, suami pertama Hannah Arendt, dengan rumusan hampir sama coba menjelaskan kondisi manusia pada era dominasi teknik dan bom atom. Anders berpandangan bahwa manusia di era teknologi modern tidak mampu lagi membayangkan akibat dari apa yang diciptakannya secara teknis. Ia terperangkap tak berdaya dalam penjara teknologi ciptaannya sendiri.

Baik Arendt maupun Anders menyerukan perlunya usaha memperluas horison fantasi moral guna menjembatani *gap* antara pemahaman dan tindakan, perasaan dan tindakan. Jika tidak demikian, manusia akan berada dalam bahaya. Bayangkan saja, demikian Anders, manusia yang sama dapat menjadi birokrat pembunuh berdarah dingin di *camp* konsentrasi dan sekaligus menjadi seorang ayah yang baik hati dan penuh kehangatan (Bdk. Anders, 1958).

Tindakan kejahatan Eichmann lahir dari defisit daya penilaian dan fantasi. Ia tidak mampu membayangkan tindakan-tindakannya sendiri. Sebab batok kepalanya sudah penuh sesak terisi dengan jargon-jargon politik klise dari rejim totalitarian nasionalisme seperti demi stabilitas nasional, pembangunan, nasionalisme, gotong royong dan kekeluargaan.

Eichman hidup di era kekuasaan dusta di mana dia tidak memiliki bahasanya sendiri untuk mengungkapkan pikiran dan menentukan nasibnya. Ia hidup dalam ketaatan absolut yang dipandang sebagai sebuah kebajikan. Ia adalah seorang fungsionaris birokrat yang taat melayani sistem kekuasaan totalitarian atau sebuah roda kecil dalam sistem mesin raksasa bernama negara.

Pancasila

Perluasan fantasi moral yang dianjurkan oleh Arendt di atas dapat dibangun melalui proses perluasan ruang solidaritas. Pembangunan harus mampu memperluas ruang solidaritas dan meminimalisasi tingkat kemiskinan dan penderitaan. Dalam ruang solidaritas itu manusia dapat menegaskan dan menentukan dirinya tidak dengan membunuh, tapi “lewat pengakuan atas kehadiran manusia lain” (F. Budi Hardiman, 2005).

Politik mewujudkan diri dalam diskusi dan perbincangan di mana “ruang antara” (*Zwischenräume*) antarmanusia terbuka dan sebuah dunia bersama terbentuk. Politik adalah wicara di ruang publik. Pengertian politik seperti ini menciptakan kebersamaan dan makna kolektif (*Gemeinsinn*). Pancasila misalnya hanya menjadi orientasi politik bersama kalau ia selalu ditematisasi di ruang publik. Tematisasi tersebut memungkinkan terciptanya dunia bersama.

Ketika Pancasila diasumsikan sebagai identitas final dan menutup kemungkinan diskursus di ruang publik, itulah awal absolutisme. Fundamentalisme entah dalam wajah agama, ideologi atau pasar lahir dari rasa pesona akan yang absolut.

Pesona terhadap yang absolut dalam politik Indonesia dewasa ini tampak dalam gerakan ultranasionalis yang memberi penekanan berlebihan pada konsep NKRI harga mati dan kultivasi ideologi Pancasila (Bdk. Hadiz and Robinson, 2017). Demi keutuhan NKRI dan kemurnian ideologi Pancasila, para penganut ultranasionalisme sektarian memandang Indonesia sebagai komunitas tertutup yang harus dilindungi dari semua pengaruh luar. Penangkalan terhadap ideologi radikal dengan menggunakan cara-cara ultranasionalis dapat melahirkan efek-efek totalitarian.

Beberapa waktu lalu misalnya Menteri Pertahanan, Jenderal Ryamizrd Ryacudu, mensinyalir adanya bahaya “ideologi materialis” yakni “liberalisme, komunisme, sosialisme dan radikalisme agama”(Bdk. *Jakarta Post*, 5/8/2017). Bagi para ultranasionalis tak ada distingsi

yang tegas antara liberalisme, sosialisme dan radikalisme agama. Ketiganya adalah ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan karena itu harus ditolak.

Sementara itu demokrasi Pancasila tak mungkin dibangun tanpa pengakuan akan liberalisme dan sosialisme. Tanpa kedua prinsip ini demokrasi Pancasila hanya akan menciptakan tirani mayoritas dan kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Di samping itu, Pancasila juga sesungguhnya sudah mengandung nilai-nilai liberal (prinsip kemanusiaan) dan sosialisme (keadilan sosial).

Ideologi Pancasila perlu dikembangkan dalam dialektika dengan liberalisme dan sosialisme. Sebab absennya tradisi liberalisme dan kekuatan politik kiri mempersulit pengorganisasian masyarakat akar rumput di Indonesia seperti buruh, petani dan kelompok kelas menengah menjadi sebuah organisasi politik yang mampu memperjuangkan dan mengadvokasi hak-haknya sendiri

* Dosen Filsafat Politik dan HAM di STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT;
alumnus program doktoral di Hochschule für Philosophie, München, Jerman.